Bukan APBD! Rp76 Miliar Dana Pusat Gempur Jalan Kabupaten Lampung Utara

Pandawanews.com, Bandar Lampung —Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp76 miliar melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk menangani sejumlah ruas jalan kabupaten di Lampung Utara. Dukungan tersebut menjadi angin segar di tengah keterbatasan fiskal kabupaten.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Mukhlis Basri, saat dikonfirmasi, Kamis (2/10/2026).

Menurutnya, anggaran Rp76 miliar tersebut akan difokuskan untuk perbaikan ruas jalan kabupaten mulai dari Ketapang, Gunung Betuah, hingga Kali Cinta. Pekerjaan ditargetkan mulai akhir Oktober 2026.

“IJD ini adalah program pemerintah pusat dengan pelaksanaan di lapangan di bawah Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). DPRD provinsi tidak memiliki kewenangan dalam penganggarannya, tapi kami tetap bisa memberikan masukan jika ada persoalan di lapangan,” ujar Mukhlis.

Ia menjelaskan, program IJD diajukan melalui usulan pemerintah kabupaten yang menyampaikan ruas jalan prioritas kepada BPJN untuk kemudian diteruskan ke Kementerian Pekerjaan Umum.

Di sisi lain, Pemprov Lampung juga terus menangani jalan yang menjadi kewenangannya. Salah satunya ruas Ketapang-Negara Ratu di Kecamatan Sungkai Utara dengan nilai penanganan sekitar Rp6,8 miliar.

Dari total 156 kilometer jalan provinsi di Lampung Utara, sekitar 93 persen sudah dalam kondisi mantap, sementara 7 persen sisanya masih memerlukan penanganan bertahap.

Mukhlis menegaskan, angka 93 persen tersebut merupakan kondisi jalan kewenangan provinsi dan tidak termasuk jalan kabupaten. Penanganan sisa 7 persen akan dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan fiskal daerah.

“Kemampuan fiskal kabupaten saat ini sangat terbatas. Jadi program IJD ini menjadi salah satu jalan keluar untuk membantu kabupaten memperbaiki ruas-ruas jalannya. Semakin banyak dukungan IJD, semakin banyak ruas yang bisa tertangani,” jelasnya.

Ia berharap penanganan jalan kabupaten melalui IJD dan jalan provinsi oleh Pemprov dapat saling terhubung, sehingga akses masyarakat, distribusi barang, dan pergerakan hasil bumi antar wilayah semakin lancar. (Cup)